**ABSTRAK**

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah adalah salah satu upaya yang dilaksanakan untuk memperkecil segala risiko – risiko yang ada yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Pengendalian Internal dapat membantu mencapai pengamanan aset, hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjelaskan bahwa pengamanan aset terdiri dari pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum. Sehubungan dengan hal tersebut penulis tertarik melakukan pebelitian dengan judul **“Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Pengamanan Aset Tetap berupa Tanah di BOKAD Kabupaten Kotabaru”** dengan fokus permasalahan pengamanan aset tetap berupa tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi SPIP terhadap pengamanan aset tetap berupa tanah, faktor – faktor yang menghambat serta upaya yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Kotabaru dalam mengamankan aset tetap berupa tanah milik Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi non partisipatif, wawancara terstruktur terbuka, dan dokumentasi didasarkan oleh konsep keberhasilan impementasi menurut Edwards III dan Pengamanan Aset berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu Pengamanan Fisik, Pengamanan Administrasi, dan Pengamanan Hukum yang dijabarkan melalui beberapa indikator.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwasannya implementasi SPIP terhadap pengamanan aset tetap berupa tanah di BPKAD Kabupaten Kotabaru telah berjalan cukup baik, namun masih terdapat beberapa faktor penghambat seperti ketidaktahuan aparat pemerintah desa, biaya penerbitan sertifikat tanah yang cukup besar, kurangnya personil pengamanan aset, serta luasnya jangkauan wilayah Kabupaten Kotabaru. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah BPKAD melakukan koordinasi dengan personil pengamanan aset daerah lainnya, menyelenggarakan sosialisasi, mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk aset tetap yang belum diamankan, melakukan pendekatan secara personal dengan Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat dan meningkatkan kompetensi bagi personil pengamanan aset tetap daerah melalui pendidikan dan pelatihan.

Kata Kunci: Pengamanan Aset Tetap, Pengendalian Internal

***ABSTRACT***

*The Government's Internal Control System is the one of effort implemented for minimize all risks which cover Control Environtment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication and Monitoring. Internal Control can help to achieve safeguarding of asset. This is in line with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 19 Year 2016 on Guidelines for Management of Regional Assets explaining that safeguarding of the region's assets consists of physical security, security administration, and legal safeguards. In connection with this matter, the researcher was interested to investigate a research entitled* ***“Implementation of The Governtment’s Internal Control System (SPIP) to Safeguarding of Asset to land in BPKAD Kotabaru”*** *which focused on the safeguarding issues of fixed assets such as land. This research was aimed to know as far implementation of SPIP to safeguarding of asset to land, the factors that hinder and efforts undertaken by BPKAD Kotabaru safeguarding the fixed asset of land owned by the Government of Kotabaru.*

*This research used a qualitative descriptive research method with inductive approach, the sources of data in this research were primary and secondary data. Moreover, data collection techniques were held through observation of non-participatory, open-structured interviews, and documentation based on the concept of successful implementation by Edwards III and Safeguarding Asset according to Regulation of the Minister of Home Affairs Number 19 Year 2016 on Guidelines for Management of Regional Assets, they are Physical Security, Security Administration, and Legal Safeguards outlined by several indicators.*

*Based on the research,that the Implementation of SPIP to Safeguading of Asset to land in BPKAD Kotabaru has been good enough, but there are still some inhibiting factors such as ignorance village officials, the cost of issuance of certificates of land is more expensive, the lack of safeguard personnel assets, and the extent of the coverage area of ​​Kotabaru. Efforts are being made to overcome these barriers namely BPKAD coordinating with safeguard personnel assets in other areas, organizing socialization, allocating a larger budget for fixed assets that have not been secured, doing a personal approach with the Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat and enhancing the competence of personnel managers of the region’s assets through education and training ,*

*Keywords: Safeguarding of Asset, Internal Control*